

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang berusaha untuk melakukan berbagai perubahan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan realitas sosial yang direspon sekolah dalam mengatasi berbagai isu yang berkembang dalam proses pembangunan mutu pendidikan. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial terbuka dalam menerima perubahan yang obyektivitas antara peran maupun internalisasi dari setiap individu yang berada dalam satuan pendidikan yang pemahamannya berbeda-beda. Khususnya dalam perubahan kebijakan yang desentralistik memerlukan penguatan pada satuan pendidikan untuk pembangunan pendidikan di era otonomi.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut penerapan prinsip demokrasi, desentralisasi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan mendasar yang dirasakan dalam dunia pendidikan saat ini adalah adanya sistem manajemen desentralistik, yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sekarang di kenal suatu istilah baru dalam manajemen pendidikan yakni manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah (MBS) muncul sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan Nasional.

Mulyasa (2002), mengemukakan manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam rangka kebijakan pendidikan nasional.

Menurut Fathurrohman dan Suryana (2011:86) bahwa paradigma MBS beraangapan bahwa satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan harus dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut.

Masyarakat adalah *stakeholder* pendidikan yang memiliki kepentingan akan berhasil pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pengawas sebagai supervisor resmi ditugasi pemerintah harus mampu bekerjasama dengan masyarakat sehingga dapat memajukan sekolah yang dibawahinya. Namun demikian, entitas yang disebut “masyarakat” itu sangat kompleks dan tak berbatas (*borderless*) sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan disekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu.

Diundangkannya UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah pada hakikatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kehadiran pola manajemen berbasis pada sekolah atau MBS tampaknya membawa angin segar di tengah-tengah kesulitan masyarakat akan kinerja pendidikan persekolahan kita akhir-akhir ini. Kinerja pendidikan kita benar-benar makin mendapat sorotan, khususnya dari segi pandang mutu masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Meski begitu, masyarakat telah menerima esensi dan urgensi pendidikan persekolahan, baik negeri maupun swasta, sebagai wahana proses kemanusiaan dan pemanusiaan ideal. Setidaknya pada tingkat kemampuan yang ada, mereka memahami bahwa kontribusi lembaga persekolahan itu adalah signifikan dalam pencapaian misi Negara mendidik generasi muda harapan bangsa.

Eksistensi MBS disekolah menjadikan peran kepala sekolah sangat penting dalam mengembangkan dan memajukan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan-*outputnya*. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis, karena pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peran strategis pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin.

Dinas pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu memainkan perannya sebagai *educator*, manajer, administrator, dan supervisor. Bahkan sekarang ada bahan tambahan lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni sebagai *leader*, *inovator*, *motivator*, *figure*, dan

mediator. Jadi, implementasi MBS sangat menuntut sikap Kreatif, inovatif, dan sikap profesionalisme kepala sekolah cukup besar.

Menurut Suparlan (2014 : 50) bahwa kepala sekolah harus menjadi pemimpin dari keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan disekolah. Kepala sekolah memang juga harus menjalankan kepemimpinan yang kuat (*strong principal leadership*), tetapi kepemimpinan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan partisipatif. Ada beberapa tingkatan dalam pelaksanaan MBS disekolah, seperti kewenangan hanya dari kepala sekolah kepada para guru saja. Tingkatan berikutnya, penyerahan kewenangan manajemen telah diserahkan sampai kepada siswa dan partisipasi orang tua siswa melalui komite sekolah, bahkan juga kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, Depdiknas melakukan prakarsa pembentukan Dewan pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 044/U/2002, tanggal 2 April 2002. Tujuannya antara lain adalah mewadahi peran serta masyarakat dalam kerangka pembangunan pendidikan yang memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, relevansi, dan peningkatan mutu.

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Bone, karena sekolah ini baru dibangun pada tahun 2006. Dengan memiliki hanya beberapa guru, bahkan guru tersebut dari luar daerah. Bagaimana mereka beradaptasi dilingkungan baru dan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk perkembangan sekolah. Sekolah ini juga hanya memiliki ruangan laboratorium IPA, ruang belajar seadanya, ruang dewan guru serta kantin. Untuk menjalankan implementasi manajemen berbasis sekolah membutuhkan banyak fasilitas untuk

menunjang perkembangan peserta didik, apalagi sekolah ini jauh berbeda dengan sekolah-sekolah SMA yang harusnya lebih lengkap fasilitasnya. Untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah, masyarakat juga harus mau berpartisipasi dalam pembangunan dan perkembangan sekolah tersebut, hal ini juga sangat menarik hati peneliti, karena sekolah ini terletak di desa yang masih terbilang jauh dari pendidikan. Masyarakatnya masih kurang memahami betapa pentingnya pendidikan, namun masyarakat yang ada disekitar sekolah ini sangat membantu para guru yang dari luar daerah, mereka menyediakan tempat dan lahan untuk tempat tinggal para guru tersebut.

Melihat begitu penting suatu lembaga pendidikan mengatur diri secara mandiri dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah, dan melihat begitu besar peran manajemen berbasis sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Kepengawasan kepala sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SMA N 1 BONE”.

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 BONE adalah sebuah sekolah dengan pemimpin seorang kepala sekolah perempuan yang berusaha menerapkan MBS. Implementasi MBS ini dipicu oleh kemauan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan. Disamping itu, implementasi MBS juga didorong oleh persaingan yang cukup ketat diantara sekolah-sekolah didaerah tersebut khususnya, dan di daerah Gorontalo pada umumnya. Dalam rangka mempertahankan eksistensi sekolah ini dihati masyarakat dan untuk peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah berinisiatif untuk menerapkan MBS di SMA N 1 BONE.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Pengawasan kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA NEGERI 1 BONE.
2. Hambatan-hambatan kepala sekolah melakukan pengawasan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA NEGERI 1 BONE.
3. Upaya kepala sekolah menyelesaikan hambatan-hambatan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA NEGERI 1 BONE.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pengawasan kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA NEGERI 1 BONE.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan di SMA NEGERI 1 BONE.
3. Untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam menyelesaikan hambatan-hambatan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA NEGERI 1 BONE.

D. Manfaat Penelitian

Adapun nilai manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi kepala sekolah sebagai pemimpin dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang implementasi MBS dan pengawasan kepala sekolah dalam implementasi MBS.
2. Sebagai bahan informasi bagi guru lainnya untuk lebih memahami implementasi manajemen berbasis sekolah.
3. Sebagai bahan bacaan bagi orang yang ingin meneliti lebih mendalam tentang manajemen berbasis sekolah.